

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran ALLAH SWT, karena atas ridho dan perkenan-Nya serta dukungan dari berbagai pihak, penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 – 2018 bisa terselesaikan.

Rencana Strategik ini disusun berpatokan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2018 serta asumsi-asumsi dasar yang menggambarkan peran serta potensi sub sektor perkebunan dalam merevitalisasi pembangunan perkebunan secara keseluruhan program-program yang urgensi ke depan bagi pembangunan perkebunan yang berbasiskan kerakyatan dan berkeadilan.

Kaidah-kaidah yang terdapat dalam Rencana Strategis 5 (lima) tahun kedepan ini berpedoman kepada paradigma, visi dan misi serta diimplementasikan dalam program yang jelas, terukur dan berlanjut serta diploting dalam sub program kegiatan yang berbasiskan satuan kinerja.

Demikianlah, semoga Rencana Strategis ini dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan Pembangunan Perkebunan di Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013-2018. Semua saran dan kritik masih kami harapkan guna penyempurnaan Rencana Strategik Pembangunan Perkebunan ke depan.

Palembang, 2014

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Ir. H. FAKHRURROZI
PEMBINA UTAMA MUDA IV.c
NIP.1963 0313 1990 03 1007

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Lampiran	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	8
II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	9
2.1 Perkembangan Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan	9
2.2 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan	15
2.3 Capaian Kinerja Keuangan Dinas Perkebunan	16
III. TUGAS POKOK DAN FUNGI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN	18
3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perkebunan	18
3.2 Struktur Organisasi Dinas Perkebunan	20
3.3 Sumber Daya Dinas Perkebunan	20
IV. ANALISA LINGKUNGAN STRATEGIS	25
4.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan SKPD	18

4.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	40
4.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota	42
V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN	43
5.1 Visi Pembangunan Perkebunan	44
5.2 Misi Pembangunan Perkebunan	45
5.3 Tujuan	45
5.4 Sasaran	46
5.5 Strategi	52
5.6 Kebijakan Pembangunan Perkebunan	52
VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	54
6.1 Program dan Kegiatan Prioritas	54
VII. PENUTUP	59
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

NOMOR	HAL
1. Data Keuangan dan realisasi	16
2. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Pendidikan Terakhir tahun 2013 ...	21
3. Keadaan Aset yang Dikelola Perkebunan Sumatera Selatan	23
4. Perkembangan Luas Areal Perkebunan Sumatera Selatan Tahun 2009-2013	30
5. Proyeksi Luas Areal Perkebunan 2013 – 2018	34
6. Proyeksi/Perkiraan Luas Areal Perkebuna Tahun 2018	50
7. Rencana Program Strategis dalam Pembangunan Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2013 – 2018	54

DAFTAR LAMPIRAN

NOMOR		HAL
1.	Matriks Renstra	60
2.	Program dan Kegiatan Renstra SKPD	61
3.	Indikator Kinerja Renstra SKPD	69
4.	Analisa SWOT	70

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan. Di samping menjadi sumber pendapatan lebih dari 1,3 Juta kepala keluarga beserta keluarganya atau sekitar 4,2 juta penduduk Sumatera Selatan, perkebunan juga mempunyai kontribusi yang cukup besar 45,02 % terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maupun terhadap perolehan devisa ekspor non migas. Menurut data BPS tahun 2013, ekspor produk perkebunan mencapai 1.508.233 Ton dengan nilai ekspor US\$. 2.883.376.178,- atau berkontribusi sebesar 87,58% dari total ekspor non migas dengan nilai US\$. 3.291.650.125,-

Hal ini menunjukkan bahwa sub sektor perkebunan sangat potensial untuk ditumbuhkembangkan sebagai sub sektor yang handal. Beberapa indikasi peran penting sub sektor perkebunan saat ini dan dimasa yang akan datang, yang kemudian perlu diprioritaskan dalam penanganannya antara lain:

1. Sumatera Selatan memiliki sumber daya alam yang baik dan sangat potensial untuk pengembangan perkebunan yang berbasis *renewable resources* dan bersifat berkelanjutan (*sustainable*).
2. Perkembangan pemasaran produk-produk perkebunan di pasar global sangat prospektif.
3. Mampu menyerap banyak tenaga kerja dan cenderung padat karya.
4. Mampu menggerakkan sekaligus mendukung agroindustri hulu seperti industri pupuk, pestisida, dan agro otomotif, dan agro industri hilir (pengolahan hasil), sampai bahan jadi.
5. Lebih tahan terhadap krisis ekonomi dibandingkan sektor sekunder dan jasa.
6. Mempunyai kontribusi positif terhadap pengembangan usaha lainnya (efek pelipatan cukup luas).

Sumatera Selatan memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantages*) dalam beberapa komoditas perkebunan. Hal ini tergambar dari tingkat produksi relatif dan pangsa pasar produksi serta pangsa pasar ekspor di pasar internasional bila dibandingkan dengan provinsi lain. Bahkan pada komoditas perkebunan utama seperti karet, kelapa sawit dan kopi berpeluang menjadi produsen dan eksportir terbesar.

Pada tahun 2013, luas areal perkebunan di Provinsi Sumatera Selatan tercatat seluas 2.528.376 Ha. Komoditas utama terdiri dari karet 1.232.038 Ha, kelapa sawit 928.223 ha, kopi 249.293 ha dan kelapa 65.308 Ha, serta aneka komoditi perkebunan lainnya seperti lada, tebu, teh, kayu manis, kemiri, cengkeh, nilam, gambir. Produksi perkebunan tahun 2013 mencapai 3.845.982 ton terdiri dari karet 1.075.209 ton, kelapa sawit 2.463.388 ton CPO, kopi 139.754 ton, kelapa 59.786 ton, dan komoditi lainnya 107.845 ton.

Kontribusi produk perkebunan dapat dilihat berdasarkan data release BPS pada tahun 2013, dari total nilai ekspor Sumatera Selatan sebesar US\$.3.913.209.930,- kontribusi sub sektor perkebunan sebesar ekspor US\$. US\$.2.883.376.178 atau sebesar 73,68 %. Kontribusi ini jika dibandingkan dengan nilai ekspor non migas, maka sektor perkebunan menyumbang sebesar 87.58%. kontribusi ini dihasilkan oleh komoditas karet sebesar US\$.2.705.487.572,- komoditas kelapa sawit sebesar US\$.168.400.075,- komoditas kopi sebesar US\$.8.491,500,- dan komoditas Teh sebesar US\$.997,031,-.

Masalah yang dihadapi dalam pembangunan perkebunan adalah masih rendahnya tingkat produktivitas dan mutu hasil, Hal ini disebabkan karena belum maksimalnya pengelolaan usaha tani perkebunan dalam

penerapan teknologi maju terutama penggunaan benih unggul yang bermutu, pupuk, pengendalian hama, penyakit dan gulma, serta penanganan panen dan pasca panen. Bersama dengan masih rendahnya tingkat kemampuan SDM dan lemahnya kelembagaan petani yang ada, lemahnya posisi rebut tawar (*bargaining position*), membuat petani pekebun belum dapat menikmati nilai tambah yang memadai baik dari kegiatan produksi atau "*on farm*" maupun kegiatan pasca produksi atau "*off farm*".

Pemasaran komoditas perkebunan tidak dapat lepas dari kondisi pasar dunia. Karena sebagian besar produk perkebunan Sumatera Selatan merupakan komoditas ekspor. Krisis keuangan dunia mengakibatkan harga beberapa komoditas perkebunan Sumatera Selatan mengalami penurunan harga yang sangat nyata. Akibatnya daya beli petani menjadi rendah terutama untuk membeli input produksi seperti pupuk, bibit, dan pestisida. Permasalahan ini tidak hanya mengakibatkan penurunan pendapatan petani tetapi juga akan menurunkan produktivitas perkebunan pada masa akan datang perkebunan akibat rendahnya input produksi yang diaplikasikan.

Pembangunan perkebunan kedepan lebih ditekankan kepada upaya peningkatan produktivitas dan mutu hasil areal perkebunan, pengembangan agribisnis dan agroindustri yang akan lebih didorong kearah

ekspor dalam bentuk hasil olahan (*down stream*). Untuk lebih efektif dan efisien, pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan pendekatan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN) dan Kawasan Utama Produksi Perkebunan (KUPP) atau *Corporate Farming* pada sentra-sentra produksi / pengembangan yang berbasis pada agribisnis secara utuh dan berazaskan kebersamaan ekonomi antar pelaku agribisnis. Hal itu dimaksudkan agar usaha perkebunan dapat efisien dan berkelanjutan dalam Pengembangan Kawasan Perkebunan maupun KUPP dapat dipadukan antara kegiatan "*on farm*" dan "*off farm*" dan adanya kawasan-kawasan KIMBUN dan kawasan-kawasan UPP tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing produksi hasil perkebunan.

1.2. Landasan Hukum

Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu **perencanaan strategis**. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa **Rencana Strategis** adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Strategi, Program dan

kegiatannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (pasal 5 dan 6) serta sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sumatera Selatan periode 2013-2018 “ **Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih Maju dan Terdepan Berdaya saing Internasional** ” maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran dan APBD disesuaikan dengan arah kebijakan Gubernur terpilih serta pendekatan kinerja. Di samping Renstra SKPD akan ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 – 2018. Dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Pembangunan Perkebunan Tahun 2013-2018 SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 - 2018 dimaksudkan untuk memberikan arah penyelenggaraan pembangunan perkebunan selama lima tahun kedepan dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan perkebunan di Sumatera Selatan. Tujuan penyusunan Renstra adalah untuk menjadikannya sebagai instrumen dalam menyatukan gerak langkah

seluruh jajaran perkebunan, tercapainya koordinasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan sub sektor perkebunan yang terintegrasi dengan sub sektor atau sektor terkait guna mencapai tujuan pembangunan perkebunan, yaitu meningkatkan kesejahteraan petani pekebun.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Pembangunan Perkebunan Propinsi Sumatera Selatan 2013-2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- 2.1. Perkembangan sektor/Bidang Perkebunan
- 2.2. Capaian Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Capaian Kinerja Keuangan SKPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III. TUGAS POKOK DAN FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- 3.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
- 3.2. Struktur Organisasi Dinas
- 3.3. Sumber Daya Dinas

BAB IV. ANALISA LINGKUNGAN STRATEGIS

- 4.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 4.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 4.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota
- 4.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 4.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN

- 5.1. Visi dan Misi Dinas Perkebunan
- 5.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas
- 5.3. Strategi Pembangunan Perkebunan
- 5.4. Kebijakan Pembangunan Perkebunan

BAB VI. Rencana Program, Kegiatan, Indikator kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERKEBUNAN SUMATERA SELATAN

2.1 Perkembangan Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan

Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan fungsi pelayanan dibidang perkebunan sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 2008 merupakan pelaksana kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi dibidang perkebunan. Dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan fungsi dinas adalah memberikan pelayanan antara lain:

2.1.1 Pelayanan dibidang Kesekretariatan

Pelayanan dalam bidang kesekretariatan meliputi penyusunan Perencanaan yang melaksanakan penyusunan rencana strategis Dinas perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2018 dengan cara mengakomodir masukan dan saran dari semua stakeholder baik Dinas/instansi di Kabupaten/kota, masyarakat, pihak akademisi dan lain-lain. Selain dari itu, setiap tahun anggaran melaksanakan penyusunan rencana kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 sampai tahun 2018, penyusunan data statistik perkebunan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan perkebunan. Selain itu dikesekretariatan melaksanakan fungsi keuangan, pengelolaan aset dinas serta kepegawaian.

2.1.2 Pelayanan dibidang Produksi

Peningkatan produktivitas perkebunan sangatlah dipengaruhi penggunaan bibit unggul serta bagaimana pelaksanaan budidaya perkebunan yang baik. Pelayanan dalam bidang produksi memiliki peran bagaimana meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan tersebut. Peningkatan produktivitas ini dilaksanakan dengan memberikan pembinaan teknis dan bantuan benih/bibit unggul yang bersertifikat, sarana produksi serta pembinaan-pembinaan pelaksanaan budidaya perkebunan yang baik kepada petani pekebun.

2.1.3 Pelayanan dibidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Dibidang pengolahan dan pemasaran hasil melaksanakan pemasaran hasil perkebunan dalam bentuk pengikutsertaan dalam pameran-pameran seperti pameran hari pangan sedunia, gelar agribisnis panas ke XIII, Sriwijaya Internasional Expo 2011, South Sumatera Expo Tahun 2012-2013, dan lain sebagainya serta pengujian mutu hasil perkebunan untuk kopi dan sawit dalam rangka menguji kadar residunya. Melaksanakan pembinaan unit pengolahan dan pemasaran bokar (UPPB). UPPB sendiri merupakan unit pengawasan peningkatan mutu bahan olah karet (bokar) agar sesuai dengan SNI 06-2047-2002 dalam penggunaan bahan pembeku yang ramah lingkungan. Sampai tahun 2013 tercatat ada 104 UPPB yang

sudah terbentuk dan dari jumlah tersebut terdapat 15 UPPB yang telah teregistrasi yaitu 8 UPPB di Kabupaten Muara Enim dan 7 UPPB di Kabupaten Ogan Ilir.

2.1.4 Pelayanan dibidang Prasarana dan Sarana Perkebunan

Dibidang ini dilaksanakan pendataan dan inventarisasi kebutuhan pupuk bersubsidi rumah tangga pekebunan berdasarkan rencana cefinitif kelompok tani atau RDKK, agar petani pekebun dapat meningkatkan produksinya dengan mendapatkan pupuk besubsidi. Selain dari itu dilaksanakan juga pelatihan pembuatan pupuk organik di seluruh Kabupaten/kota agar petani dapat memanfaatkan limbah perkebunan yang ada untuk dijadikan pupuk organik. Selain itu lahan harus ditingkatkan produktifitasnya melalui perluasan areal tanam dan optimasi lahan serta sertifikasi lahan sehingga lahan menjadi layak untuk dijadikan agunan ke pihak perbankan untuk memperoleh pembiayaan lebih lanjut.

2.1.5. Pelayanan dibidang Kelembagaan Usaha Perkebunan

Dibidang ini melaksanakan pengawasan dan pembinaan perusahaan-perusahaan perkebunan agar melaksanakan usahanya sesuai dengan peraturan dan undang-undang. Pelaksanaan rekomendasi kelayakan usaha perkebunan juga diberikan terhadap perusahaan yang akan mengajukan

HGU baru atau perpanjangan. Selain itu menjaga kemitraan perkebunan agar tetap harmonis serta melaksanakan pembinaan kelembagaan petani melalui sistem kebersamaan ekonomi (SKE) dan sebagainya.

2.1.6. Pelayanan dibidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan

Pelayanan dalam melaksanakan sertifikasi benih dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan melalui UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan (BPSBTP) dengan memberikan bimbingan teknis pengawasan dan pengujian mutu benih serta penyiapan benih bermutu sesuai standar mutu benih yang ada sesuai juga dengan Sesuai dengan undang-undang nomor 12 Tahun 1992 tentang perbenihan tanaman, PP nomor 44 tahun 1995. Proses sertifikasi ini dilaksanakan untuk menghindari beredarnya benih-benih yang tidak unggul. Dengan dilaksanakannya proses sertifikasi ini diharapkan benih/bibit yang ditanaman merupakan benih/bibit unggul sehingga dapat meningkatkan mutu dan produktivitas tanaman perkebunan.

Untuk mendapatkan sertifikat mutu benih para stakeholder harus mengajukan permohonan sertifikasi dan/pengujian. Persyaratannya harus melampirkan Sertifikat Mutu Benih (SMB) asal sumber benih yang

dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan melampirkan tanda registrasi usaha perbenihan (TRUP) yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi/Instansi yang berwenang. Untuk setiap tahun target sertifikasi dan pengujian sebesar 80 juta benih yang meliputi benih karet, benih kelapa sawit, kopi, kakao, lada dan sebagainya sehingga diharapkan setiap tahunnya akan beredar benih yang bermutu dan bersertifikat/label sebanyak 80 juta benih.

2.1.7. Pelayanan dibidang Proteksi Tanaman Perkebunan

Pelayanan dalam bidang proteksi perkebunan dengan memberikan pelatihan-pelatihan petani dalam melaksanakan pengamatan Organisme pengganggu tanaman dan bagai mana cara penanggulangnya. Pelayanan ini dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (UPTD BPTP) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan. Pelayanan proteksi juga dengan memproduksi agens hayati seperti trichoderma untuk penanggulangan penyakit jamur akar putih (JAP) yang sering menyerang tanaman karet. Setiap tahunnya UPTD BPTP mampu memproduksi trichoderma sebanyak 50 ton.

2.2 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan

Selama tahun 2008 – 2013 banyak yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan. Peningkatan produksi tanaman perkebunan juga meningkat selaras dengan pertumbuhan luas areal perkebunan. Pada tahun 2009 total luas areal tanaman perkebunan sebesar 2.206.220 Ha meningkat menjadi 2.528.376 Ha pada tahun 2013 atau meningkat sebesar 14,60% atau sekitar 2,9% pertahun. Peningkatan luas areal ini terutama pada komoditas karet dari luasan 1.058.420 Ha pada tahun 2009 meningkat menjadi 1.232.038 Ha atau meningkat 14,09%. Peningkatan luas areal kelapa sawit dari tahun 2009 seluas 775.503 Ha menjadi 928.223 Ha pada tahun 2013 atau meningkat sebesar 16.45%.

Selain luas areal juga terjadi peningkatan pada produksi perkebunan, dari total produksi perkebunan tahun 2009 sebesar 3.209.194 ton menjadi 3.845.982 ton pada tahun 2013 atau meningkat 19,84%. Peningkatan produksi ini terutama pada komoditas unggulan yaitu karet dari tahun 2009 sebesar 888.327 ton menjadi 1.075.209 ton pada tahun 2013 atau meningkat 21,04 %. Produksi komoditas kelapa sawit dari tahun 2009 sebesar 2.036.554 ton menjadi 2.463.388 ton pada tahun 2013 atau meningkat sebesar 20,96%.

2.3 CAPAIAN KINERJA KEUANGAN DINAS PERKEBUNAN

Dari tahun 2008 – 2013 Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp.135.071.010.099,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 121.455.033.223,- atau terealisasi sebesar 98,92% (lihat tabel). Dapat dilihat dari data semakin besar alokasi dana yang diberikan maka realisasi penyerapan keuangannya akan semakin besar. Menurut data di Tahun 2008 realisasi keuangan sampai 93,50%, begitu juga pada Tahun anggaran 2013 realisasi keuangannya sampai 93,09%.

Tabel 1. Data Keuangan dan Realisasi

TAHUN	PAGU	REALISASI	%
2008	29.888.257.700	27.944.950.911	93,50
2009	19.632.899.336	16.734.758.014	85,24
2010	18.938.655.838	15.703.219.506	82,92
2011	19.066.841.720	16.865.654.341	88,46
2012	20.891.735.505	19.394.944.592	92,84
2013	26.652.620.000	24.811.505.859	93,09
TOTAL	135.071.010.099	121.455.033.223	89,92

Namun dana ini masih jauh dari nilai investasi yang diperlukan dalam pembangunan perkebunan. Untuk peremajaan karet saja yang memerlukan sekitar 40.000 Ha setiap tahun maka akan memerlukan dana Rp. 200 Milyar (asumsi per ha Rp. 5 Juta), belum lagi untuk meremajakan kelapa sawit rakyat, kopi, kakao, kelapa dan lain sebagainya. Untuk itu dukungan dana baik dari APBN,

APBD, Perbankan, swadaya masyarakat/petani serta dana investasi dari perusahaan besar sangatlah diperlukan.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN

3.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perkebunan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka di Provinsi Sumatera Selatan telah terbit Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 tahun 2008 tanggal 18 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 13 tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 76 tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

Tugas Pokok Dinas Perkebunan **melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang perkebunan.**

Untuk melaksanakan tugas Dinas Perkebunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. Pembinaan dan pengendalian teknis di bidang perkebunan;

- c. Pelaksanaan proses pemberian izin dan pembinaan, usaha sesuai tugasnya;
- d. Penyelenggaraan penyuluhan dan pembinaan kemitraan usaha perkebunan;
- e. Pembinaan dan pengamanan teknis sesuai dengan tugasnya;
- f. Penyelenggaraan, pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran;
- g. Penyelenggaraan ketatausahaan dinas;
- h. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Melihat dari tugas dan fungsinya maka Pembangunan Perkebunan di Sumatera Selatan mempunyai peranan yang sangat besar dalam pertumbuhan perekonomian Provinsi Sumatera Selatan terutama dalam menghasilkan devisa, penyediaan lapangan kerja dan sumber pendapatan lebih dari satu juta kepala keluarga, menghasilkan bahan baku bagi industri, pengembangan wilayah serta memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

3.2. Struktur Organisasi Dinas Perkebunan

Berdasarkan Perda Nomor 8 tahun 2008 maka struktur organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan memiliki 1 orang pejabat eselon II, 7 Orang pejabat Eselon III yang meliputi 1 orang sekretaris, 4 Kepala bidang 2 Kepala UPTD serta 21 pejabat eselon IV.

STRUKTUR ORGANISASI



3.3. Sumber Daya Dinas Perkebunan

3.3.1. Susunan Kepegawaian

Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2013 berjumlah 152 orang yang berstatus Pegawai Negeri

Sipil (PNS) dan struktur pegawai perkebunan masih didominasi oleh lulusan SD, SLTP dan SMA sebanyak 64 orang (52,11 %), D1 sampai D4 sebanyak 14 orang (9,21 %), Sarjana/S1 sebanyak 54 orang (34,21 %) sedang S1 berlatar belakang teknis pertanian sebanyak 28 orang (18,42 %) sedangkan sisanya 26 orang non teknis atau sarjana administrasi (17,11 %), dan Pasca Sarjana /S2 sebanyak 20 orang (13,16 %). Bila kita bandingkan dengan rentang kendali pembangunan perkebunan belum sesuai dengan potensi perkebunan yang ada di Sumatera Selatan, sehingga masih memungkinkan penambahan tenaga teknis dan penyuluhan untuk mendampingi petani dipedesaan. Berikut ditampilkan keadaan Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 sebagai berikut :

Tabel.2. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 2013.

NO	Uraian Jabatan	Jumlah PNS (org)	PENDIDIKAN TERAKHIR			
			S3 (Org)	S2 (org)	S1 (org)	D3/SLTA/SLTP/SD (org)
1.	ESSELON II.A.	1	-	-	1	-
2.	ESSELON III.A.	7	-	6	1	-
3.	ESSELON.IV.A	21	-	11	10	-
4	NON ESSELON	123	-	3	42	78
5.	TENAGA HONOR DAN KONTRAK	15	-	-		
	JUMLAH	152	-	20	72	178

Keadaan ini tidak sejalan dengan restrukturisasi pegawai yang menginginkan jabatan-jabatan fungsional khususnya teknisi diperbanyak karena jabatan fungsional menuntut profesionalisme yang dicerminkan oleh tingkat pendidikan.

3.3.2. Aset yang dikelola.

Dalam memfasilitasi pembangunan perkebunan di Sumatera Selatan, aset yang dikelola barang bergerak dan tidak bergerak antara lain yaitu Gedung Kantor, Laboratorium 2 unit benih dan hama penyakit, Sub Lab Hayati 2 unit, 1 Laboratorium produksi, Kendaraan roda 4 sebanyak 7 unit dan Kendaraan roda 2 sebanyak 98 unit, computer 22 unit, laptop 8 unit dengan kondisi sebagian besar sudah tua atau rusak ringan sampai rusak berat dan lain-lain yang tersebar di 17 Kabupaten/Kota, asset yang dikelola oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan bersumber dana APBN 85 % dan APBD 15 % yang berlokasi di Kabupaten/Kota terutama Gedung Kantor UPP (Unit Pelayanan Proyek) 22 unit dan UPPT (Unit Pelayanan Pengendalian Terpadu) 12 unit untuk basecam petugas hama penyakit tanaman sejak 2 tahun terakhir ini mendapat biaya rehabilitasi berat dari sumber dana APBN sebanyak 4 unit dan rehabiltasi ringan 8 unit dari APBD Provinsi berupa pengecatan dan perbaikann atap bangunan, perolehan sejak

tahun 1981 sampai tahun 2013 serta asset-aset tersebut masing merupakan kekayaan pusat dalam ini Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian Republik Indonesia, berikut table yang menggambarkan kondisi asset yang mendukung operasional pelaksanaan pembangunan perkebunan di Sumatera Selatan.

Tabel.3. Keadaan Aset yang dikelola Perkebunan Sumatera Selatan

NO	JENIS BARANG/ ASET	KONDISI ASET YANG ADA (UNIT)				KET
		BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	JUMLAH	
1.	Gedung Kantor	8	10	16	34	APBN
2.	Laboratorium	3	-	-	3	APBN
3.	Sub Lab.Hayati	1	-	1	2	APBN
4	Kend.Roda 4	-	1	1	2	APBN
5.	Kend.Roda 2	20	23	31	74	APBN
6.	Komputer/Laptop	12	4	6	22	APBN.

Catatan : **Penggadaan sumber dana APBN.**

No	JENIS BARANG	KONDISI ASET YANG ADA (UNIT)				KET
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah	
1	Tanah	7	-	-	7	Persil
2	Bangunan Gedung	4	2	-	6	unit
3	Kend.Roda.2.	16	2		18	unit
4	Kend. Roda 4	4	1	-	5	Unit
5.	Komputer	4	-	-	4	unit
6.	Meja kerja	234	40	-	274	buah
7.	Kursi kerja	299	26	-	325	buah

Catatan : **Penggadaan sumber dana APBD Provinsi.**

BAB IV.

ANALISA LINGKUNGAN STRATEGIS

4.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan SKPD

4.1.1. Analisa Lingkungan Strategis.

Analisa lingkungan strategis merupakan suatu upaya obyektif untuk merumuskan dan memformulasikan strategi pembangunan perkebunan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pendekatan analisis **SWOT** (***Strength, Weakness, Opportunity, Threat***) digunakan untuk menganalisis lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan analisis lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) yang mempengaruhi pembangunan perkebunan. Melalui analisis ini diharapkan Dinas Perkebunan dapat menempatkan posisi strategis dan peranannya dalam pembangunan perkebunan dan mengantisipasi kemungkinan perubahan yang terjadi.

4.1.2. Analisa Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan)

4.1.2.1 Kekuatan (Strength)

NO	INDIKATOR	POTENSI (%)	SKOR	SKOR TERTIMBANG
1	Luasnya Existing Area	40	4	1,6
2	Tersedianya SDM Perkebunan	30	4	1,2
3	Tersedianya Teknologi Perkebunan	30	3	0,9
				3,7

Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Luasnya existing area

Perkembangan luas areal perkebunan di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2009 - 2013 menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi. Pada tahun 2009 total luas areal tanaman perkebunan sebesar 2.206.220 Ha meningkat menjadi 2.528.376 Ha pada tahun 2013 atau meningkat sebesar 14,60 % atau sekitar 2,9% pertahun. Dengan total areal untuk perkebunan sesuai RTRW Provinsi Sumatera Selatan adalah 3,2 Juta Ha yang tersebar di 17 Kabupaten/Kota, artinya kemungkinan untuk pengembangan komoditas perkebunan sangatlah masih memungkinkan sekitar 700 ribu Ha lagi.

b. Besarnya kuantitas SDM

Sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan sub sektor perkebunan di Sumatera Selatan. Dalam pembangunan perkebunan ada 2 (dua) sisi sumber daya manusia yang berperan yaitu jumlah tenaga / petugas yang tersedia sebagai pendamping, pembina maupun sebagai penyuluh petani perkebun dan kualitas SDM petani pekebun sebagai pengelola lahan usaha.

Data tahun 2013 menunjukkan bahwa sub sektor perkebunan melibatkan lebih dari 1,3 juta KK petani pekebun. Sedangkan jumlah SDM petugas yang tercatat di Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan sebagai pembina, pendamping maupun penyuluh adalah sebanyak 152 orang yang terdata di Dinas Perkebunan Provinsi. Sumber daya manusia (petugas) ini belum termasuk petugas – petugas yang ada di daerah Kabupaten / kota yang membidangi perkebunan. Bila dilihat dari jumlah petugas dan SDM petani pekebun secara kuantitas, maka hal ini merupakan suatu kekuatan yang potensial dalam kegiatan pembangunan perkebunan di Provinsi Sumatera Selatan.

c. Tersedianya Teknologi

Dalam era globalisasi produk hasil perkebunan dituntut harus mempunyai daya saing tinggi. Untuk mendapatkan produk yang berdaya saing tinggi ada 2 (dua) faktor yang menentukan yaitu produktivitas yang tinggi dan mutu hasil yang tinggi pula. Untuk mengantisipasi hal ini diperlukan teknologi maju dalam pembangunan perkebunan. Sebagaimana diketahui untuk meningkatkan produktivitas komoditi yang diusahakan perkebunan telah tersedia berbagai teknologi antara lain : bibit-bibit/benih-benih unggul karet Generasi IV seperti PB 260, RRIC 100, BPM,TRR, demikian juga untuk benih kelapa sawit yang baru di hasilkan seperti Sriwijaya 1,2,3,4,dan 5.

Teknologi lain yang tersedia adalah optimalisasi pemanfaatan lahan dengan pola diversifikasi dan intensifikasi, sedangkan untuk peningkatan mutu hasil Balai Penelitian Perkebunan telah menghasilkan teknologi yang dapat diaplikasikan di tingkat petani perkebunan, misalnya untuk produk karet, kopi. Termasuk juga teknologi peremajaan untuk kopi melalui sambung pucuk yang daapt meningkatkan produktivitas hingga 3 kali.

4.1.2.2 Kelemahan (Weakness)

NO	INDIKATOR	POTENSI (%)	SKOR	SKOR TERTIMBANG
1	Rendahnya Produktivitas dan Mutu Hasil	40	4	1,6
2	Rendahnya Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani Pekebun	30	3	0,9
3	Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung	30	3	0,9
				3,4

Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Rendahnya produktivitas dan mutu hasil

Kondisi produktivitas hasil perkebunan pada umumnya masih rendah terutama perkebunan rakyat. Rendahnya produktivitas hasil karena penerapan teknologi maju di petani yang belum optimal. Hal ini dikarenakan karena keterbatasan modal dan pengetahuan, sebagian besar petani belum menggunakan benih/bibit unggul, serta rendahnya penggunaan pupuk dan obat-obatan bahkan kadang-kadang sarana produksi ini langka dipasaran, serta makin banyaknya tanaman yang sudah masuk ketegari tanaman tua/rusak sehingga mengakibatkan produksi menurun. Untuk itu perlu adanya upaya peningkatan produktivitas perkebunan rakyat. Akselerasi produktivitas komoditas perkebunan sangat terkait kepada pola

pengelolaan teknis budidaya, mulai dari penyiapan lahan, penggunaan bibit/benih unggul, pemeliharaan, pengendalian hama penyakit, panen dan penanganan pasca panen.

Sebagai perbandingan, pada tahun 2009 luas areal perkebunan tercatat baru 2.206.220 Ha sedangkan tahun 2013 meningkat menjadi 2.528.376 Ha meningkat sebesar 14,6% atau pertumbuhan rata-rata sekitar 2,9% pertahun. Data secara rinci perkembangan total luas areal perkebunan Sumatera Selatan tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Perkembangan Luas Areal Perkebunan Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2009-2013

No	Komoditi	Luas Areal				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Karet	1.058.420	1.195.111	1.204.995	1.213.530	1.232.038
2	Kelapa Sawit	775.503	818.346	820.787	827.028	928.223
3	Kelapa	67.737	67.646	67.694	66.787	65.308
4	Kopi	257.848	256.149	252.470	252.412	249.293
5	Kakao	6.720	8.201	9.027	9.945	10.175
6	Lada	11.074	11.475	11.378	11.642	11.627
7	Tebu	18.137	23.832	23.406	37.448	21.744
8	Lain-Lain	10.781	10.641	10.587	10.340	9.968
	Jumlah	2.206.220	2.391.401	2.400.344	2.429.132	2.528.376

* Angka Sementara Tahun 2013

Dari produktivitas komoditi perkebunan pun masih banyak yang bisa ditingkatkan terutama untuk komoditas karet dan kopi. Peningkatan produktivitas ini dapat dilaksanakan dengan melakukan

peremajaan tanaman yang sudah tua baik itu melalui pergantian tanaman yang tua dengan benih baru yang bersertifikat maupun dengan melaksanakan rejuvinasi (sambung pucuk) untuk tanaman kopi. Dengan menerapkan teknis penyadapan yang baik dapat memperpanjang usia produktif sehingga produktivitas per siklus hidup karet meningkat.

Mutu hasil perkebunan sebagaimana produktivitas juga rendah terutama hasil perkebunan rakyat, karena produksinya masih produk asalan, sebagai contoh petani belum mengolah bahan olah karet (bokar) sesuai teknologi yang dianjurkan, buah kopi dipanen masih bercampur buah hijau atau melaksanakan penjemuran di atas tempat yang tidak layak.

b. Rendahnya kualitas SDM dan Kelembagaan petani

Masalah yang dihadapi dalam pembangunan perkebunan selama ini adalah masih rendahnya tingkat produktivitas dan mutu hasil, hal ini disebabkan belum maksimalnya pengelolaan usaha dalam penerapan teknologi, penanganan panen dan pasca panen ini akibat rendahnya kualitas SDM petani pekebun. Di samping itu belum berperan dan berkembangnya kelembagaan di tingkat petani,

mulai dari kelompok tani, gabungan kelompok tani maupun koperasi primer di tingkat petani sehingga posisi rebut tawar (bargaining position) petani hanya sebagai “ ***Price taker*** ” bukan sebagai “ ***Price Decider*** ” dan bergerak hanya pada on farm dan margin hanya diperoleh dari penjualan produk primer.

Di samping masalah rendahnya kualitas SDM petani, kemampuan petugas lapangan dalam mentransfer pengetahuan dan ketrampilan kepada petani masih terbatas, sehingga masih memerlukan peningkatan pendidikan dan pelatihan serta menambah wawasan berpikir bagi para petugas.

c. Kurang tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana perkebunan

Aktifitas perkebunan pada umumnya terdapat pada wilayah – wilayah terpencil, dengan kondisi prasarana perhubungan darat seperti jalan dan jembatan yang belum memadai, yang diperlukan untuk kelancaran sarana transportasi baik untuk angkutan saprodi maupun pengangkutan hasil produksi perkebunan dari dan ke sentra produksi perkebunan. Di samping itu perlu adanya dukungan prasarana perhubungan laut seperti pelabuhan ekspor mengingat pelabuhan Boom Baru tidak memadai lagi untuk penambahan

kapasitas bongkar muat dan angkutan, sehingga sebagian hasil perkebunan diekspor melalui pelabuhan Lampung.

Keadaan perekonomian yang belum kondusif dengan harga sarana produksi baik pupuk, obat – obatan maupun bibit unggul semakin meningkat sehingga tidak terjangkau oleh dayabeli petani. Di samping harga saprodi yang tinggi, pada tempat-tempat tertentu saprodi tidak tersedia atau langka, kondisi ini merupakan kendala bagi petani untuk petani meningkatkan produktivitasnya.

4.1.3. Analisa Lingkungan Eksternal (Peluang dan Ancaman)

4.1.3.1 Peluang (Opportunity)

NO	INDIKATOR	POTENSI (%)	SKOR	SKOR TERTIMBANG
1	Potensi areal masih tersedia	40	4	1,6
2	Pengembangan industri hilir dalam negeri	30	4	1,2
3	Integrasi dan Diversifikasi Perkebunan	30	3	0,9
				3,7

Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Potensi areal masih tersedia

Potensi lahan untuk pengembangan perkebunan masih tersedia cukup luas hampir di seluruh Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan, kawasan budidaya yang diarahkan untuk budidaya perkebunan sekitar 3,2 juta hektar. Areal yang sudah dimanfaatkan untuk usaha tanaman perkebunan baru sekitar seluas 2,5 juta hektar. Dengan demikian potensi lahan yang masih tersedia untuk pengembangan usaha perkebunan seluas 700 ribu hektar.

Tabel.5. Proyeksi Luas Areal Perkebunan 2013 - 2018

No	JENIS/KOMODITI	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Karet (<i>Hevea brasiliensis</i> Mull)	1.232.038	1.235.000	1.237.000	1.238.000	1.239.000	1.240.000
2	Kelapa Sawit (<i>Elaeis guinensis</i> Jacq)	928.223	930.000	935.000	940.000	945.000	950.000
3	Kelapa (<i>Cocos nucifera</i>)	65.308	65.308	65.308	65.308	65.308	65.308
4	Kopi (<i>Coffea</i> spp)	249.293	249.293	249.293	249.293	249.293	249.293
5	Kakao (<i>Theobroma cacao</i>)	10.175	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6	Lada (<i>Piper nigrum</i> L)	11.627	11.627	11.627	11.627	11.627	11.628
7	Kemiri (<i>Reutealis trisperma</i>)	2.973	2.974	2.974	2.974	2.974	2.974
8	Cengkeh (<i>Eugenia aromatic</i> O.K.)	204	204	204	204	204	204
9	Pinang (<i>Arreca catechu</i>)	1.583	1.609	1.609	1.609	1.609	1.609
10	Kayu Manis (<i>Cinnamomum burmanii</i> Bl)	1.194	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
11	Panili (<i>Vanilla planifolia</i> Andrews)	31	33	33	33	33	33
12	Gambir (<i>Uncaria gambir</i> Roxb)	503	566	566	566	566	566
13	Aren (<i>Arenga pinata</i>)	1.094	1.264	1.264	1.264	1.264	1.264
14	Tembakau (<i>Nicotiana tabacum</i> L.)	286	311	311	311	311	311
15	Kapok (<i>Ceiba petandra</i>)	457	472	472	472	472	472
16	T e h (<i>Camelia sinensis</i>)	1.429	1.429	1.429	1.429	1.429	1.429
17	Tebu (<i>Sacharum offisinarum</i> L.)	21.744	22.000	22.500	23.000	23.500	24.000
18	Nilam (<i>Pogostemon cablin</i> Benth)	214	214	214	214	214	214
	Total.....	2.528.376	2.533.999	2.541.499	2.547.999	2.554.499	2.561.000

Kegiatan perluasan dan pengembangan tanaman perkebunan masih memungkinkan untuk dilaksanakan seperti pengembangan komoditas Karet, Kelapa Sawit, Kakao, Tebu, Lada. Di samping komoditi di atas ada juga komoditi harapan yang mempunyai nilai jual tinggi di pasar dalam dan luar negeri seperti aren, pinang, gambir, harami, nilam dan sebagainya.

b. Pengembangan Industri Hilir dalam Negeri

Kecenderungan permintaan pasar untuk komoditi perkebunan baik di dalam maupun di luar negeri terus meningkat, sehingga merupakan peluang untuk perkembangan produksi komoditi perkebunan. Agroindustri dalam negeri saat ini sedang dalam tahap pengembangan yang memerlukan dukungan pasokan bahan baku yang cukup, sehingga hal ini juga merupakan peluang yang harus dimanfaatkan dalam mengembangkan perkebunan di Sumatera Selatan. Sebagai ilustrasi masih terbukanya peluang mengembangkan industri hilir baik pada komoditi karet, kelapa sawit, kopi, lada dan kelapa. Dengan berkembangnya industri hilir dalam negeri diharapkan ekspor komoditas tidak lagi dalam bentuk bahan mentah, namun sudah merupakan bahan olahan jadi sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja baru.

c. Integrasi dan Diversifikasi Perkebunan

Sejalan dengan pembangunan perkebunan yang berwawasan agribisnis, maka untuk lebih meningkatkan pendapatan petani serta lebih mengefisienkan fungsi lahan dapat diupayakan dengan diversifikasi serta integrasi tanaman perkebunan dengan ternak. Melakukan diversifikasi tanaman kopi dengan Kakao dan lada serta melakukan integrasi Tanaman Kelapa Sawit dengan Sapi dan Kambing. Pengubahan pola usaha tani ini diperuntukan agar petani tidak tergantung dengan satu komoditas saja sehingga pendapatan para petani bisa ditingkatkan secara optimal. Dengan luasnya areal kopi, kelapa sawit, karet dan sebagainya sehingga potensi untuk dilaksanakan diversifikasi dan integrasi sangatlah besar.

4.1.3.2 Ancaman (Threat)

NO	INDIKATOR	POTENSI (%)	SKOR	SKOR TERTIMBANG
1	Meningkatnya tuntutan mutu produk	40	4	1,6
2	Iklim usaha yang kurang kondusif	30	3	0,9
3	Kampanye negatif produk perkebunan dari luar	30	3	0,9
				3,4

Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Meningkatnya Tuntutan mutu produk

Tuntutan mutu produk hasil perkebunan akhir – akhir ini baik dalam negeri maupun pasar dunia makin meningkat, namun produk yang dihasilkan perkebunan (rakyat) pada umumnya masih rendah (asalan), sehingga menyebabkan harga jual produk yang diterima petani juga rendah. Di sisi lain upaya merangsang harga yang lebih baik dari produk berkualitas tinggi masih mengalami hambatan, karena harga yang diterima di tingkat petani hampir tidak berbeda antara produk bermutu baik dengan produk bermutu rendah.

Untuk mendapatkan mutu produk yang baik, produsen harus menguasai cara pengolahan sesuai SNI dan standarisasi ekspor. Untuk semua hasil produk perkebunan yang akan di ekspor diberlakukan standar ISO 9000, ISO 14.000. termasuk kadar residu terhadap produk-produk perkebunan akibat pengelolaan pasca panen yang masih tidak standar serta penggunaan bahan-bahan kimia yang tinggi.

b. Iklim berusaha kurang kondusif

Iklim usaha yang kurang kondusif ini dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah yang tidak populer, misalnya pemberlakuan pajak ekspor CPO, selain itu faktor keamanan yang

kurang mendukung, baik gejolak ekonomi (penjarahan kebun) maupun gejolak politik.

Iklim usaha yang kurang kondusif ini juga termasuk system perpajakan, kepastian hukum terhadap sengketa lahan dan banyak Peraturan Daerah yang tidak mendukung iklim investasi yang mengakibatkan tingginya resiko investasi.

c. Kampanye negatif produk perkebunan indonesia

Ada isu – isu negatif dari luar negeri terhadap penggunaan produk hasil negara Indonesia dan ASEAN, misalnya : minyak goreng dari produk kelapa sawit banyak mengandung kolesterol. Serta budidaya perkebunan Indonesai yang merusak ekosistem orang utan serta mengakibatkan deforestasi sangatlah merugikan produk perkebunan Indonesia.

Isu-isu negatif yang disebarkan sengaja untuk menekan pengembangan perkebunan di Indonesia, terutama untuk komoditas yang bersaing dipasar global seperti Kelapa Sawit. Kampanye negatif ini apabila tidak ditindaklanjuti akan mengakibatkan penurunan harga komoditas dan permintaan ekspor dari negara-negara lain.

Dari hasil analisa lingkungan strategis Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dapat disandingkan sebagai berikut:

INDIKATOR	SKOR TERTIMBANG	INDIKATOR	SKOR TERTIMBANG
Kekuatan	3,7	Peluang	3,7
Kelemahan	3,4	Ancaman	3,4
Keseimbangan	0,3	Keseimbangan	0,3

Dapat dikatakan posisi Perkebunan di Provinsi Sumatera memasuki tahapan pemantapan yaitu dengan kekuatan yang ada diharapkan terus memanfaatkan peluang yang tersedia.



4.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih yaitu”
Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih Maju dan Berdaya Saing Internasional’ dengan misi :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
2. Memantapkan Stabilitas Daerah
3. Meningkatkan Pemeretaan yang Berkeadilan
4. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan yang Lestari dan penanggulangan Bencana

Dari misi tersebut terutama bagaimana meningkatkan pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan peran sektor perkebunan sangatlah besar. Kontribusi sub sektor perkebunan dalam pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari data statistik, karena sebagian besar penduduk di Sumatera Selatan bergantung pada sub sektor perkebunan. Saat ini luas areal perkebunan di Sumatera Selatan Tahun 2013 sudah mencapai 2,4 juta Ha dengan kepemilikan sekitar 1,3 juta KK. Jika kita asumsikan 1 KK menghidupi 4 jiwa, maka sekitar 5,2 juta jiwa atau sekitar 70.3% dari 7,4 juta jiwa penduduk Sumatera Selatan yang hidupnya bersumber dari sektor perkebunan. Hal ini dapat kita lihat begitu strategisnya peran perkebunan

dalam perekonomian daerah. Dari data Badan Pusat Statistik Palembang, pada tahun 2013, dari total nilai ekspor Sumatera Selatan sebesar US\$.3.913.209.930,- kontribusi sub sektor perkebunan sebesar ekspor US\$. US\$.2.883.376.178 atau sebesar 73,68 %. Kontribusi ini jika dibandingkan dengan nilai ekspor non migas, maka sektor perkebunan menyumbang sebesar 87.58%. kontribusi ini dihasilkan oleh komoditas karet sebesar US\$.2.705.487.572,- komoditas kelapa sawit sebesar US\$.168.400.075,- komoditas kopi sebesar US\$.8.491,500,- dan komoditas Teh sebesar US\$.997,031,-.

Nilai tukar petani (NTP) perkebunan pada bulan Februari 2014 100,51% yang artinya indeks harga yang diterima petani perkebunan masih lebih besar dibandingkan dengan indeks yang dikeluarkan/dibayar petani perkebunan pada bulan februari. Nilai NTP pekebun ini mengalami penurunan 1,68% jika dibandingkan dengan NTP pekebun pada bulan Januari 2014.

4.3. Telaah Renstra K/L dan renstra Kabupaten/kota

Mengacu pada Undang-Undang nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2005-2025 pembangunan perkebunan tetap memegang peranan yang penting dan strategis. Peran strategis sub sektor perkebunan tersebut digambarkan untuk mensukseskan pencapaian 4 target utama pembangunan pertanian dengan komoditas Tebu yang ditetapkan sebagai bahan baku pokok untuk mencapai Swasembada Gula nasional. Selanjutnya adalah bagaimana untuk peningkatan Diversifikasi Pangan, Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor serta Peningkatan Kesejahteraan Petani.

BAB.V.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan nomor 8 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang Perkebunan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan dan Pembangunan di bidang perkebunan yang diserahkan / desentralisasi dan yang dilimpahkan / dekonsentrasi kepada Propinsi, dengan fungsi utama menyelenggarakan pembinaan umum dan teknis, penyusunan kebijakan, proses perizinan usaha, dan penyelenggaraan penelitian spesifikasi daerah.

Untuk mengantisipasi era globalisasi perdagangan bebas yang lebih mengutamakan kualitas produk, serta berdasarkan pengalaman, kondisi dan lingkungan strategis yang mempengaruhi pembangunan perkebunan maka pembangunan perkebunan 2013 – 2018 mempunyai paradigma ***"Pembangunan ekonomi masyarakat dan daerah melalui pembangunan perkebunan"***

5.1. Visi Pembangunan Perkebunan

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, serta paradigma pembangunan perkebunan tersebut maka visi pembangunan perkebunan adalah :

“Perkebunan Sumatera Selatan lebih Maju, Berdaya Saing Internasional, Berkelanjutan, dan Sebagai Sumber Kesejahteraan Masyarakat Perkebunan”

Bila kita sandingkan visi pembangunan perkebunan dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur 2013-2018 mempunyai tujuan dan sasaran yang sama menuju Sumatera Selatan lebih maju dan berdaya saing internasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2018. Visi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- ✓ Lebih Maju mengandung makna perkebunan Sumatera Selatan mengalami kemajuan dalam penggunaan teknologi dan inovasi.
- ✓ Berdaya Saing Internasional mengandung makna hasil produksi dapat bersaing dengan produk dari negara lain penghasil perkebunan.
- ✓ Berkelanjutan mengandung makna pembangunan perkebunan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan kaidah berwawasan lingkungan dan kelestarian alam, serta

- ✓ Sumber Kesejahteraan mengandung makna perkebunan Sumatera Selatan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat lebih bermartabat.

5.2. Misi Pembangunan Perkebunan

Sejalan dengan Visi diatas , serta pokok - pokok pemikiran dalam pembangunan perkebunan, maka misi Dinas Perkebunan adalah :

1. Mendorong peningkatan kualitas SDM, informasi dan kelembagaan perkebunan.
2. Memfasilitasi Penyediaan bahan Baku Industri yang Berdaya Saing Internasional.
3. Mendorong Pengoptimalan Pemanfaatan Lahan dan Pelestarian Lingkungan, serta
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perkebunan.

5.3. TUJUAN

Untuk mencapai visi dan misi maka tujuan pembangunan perkebunan antara lain :

- a. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengelola perkebunan dan kapasitas kelembagaan perkebunan;
- b. Mengembangkan sistem informasi perkebunan yang handal;
- c. Meningkatkan mutu dan nilai tambah hasil perkebunan;

- d. Meningkatkan investasi pembangunan perkebunan yang berwawasan lingkungan;
- e. Mengembangkan Perkebunan yang unggul dan berdaya saing

5.4. SASARAN

Sasaran pembangunan perkebunan pada periode tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dan kelembagaan petani pekebun

Pengelolaan usaha perkebunan akan semakin baik jika kualitas sumberdaya manusia yang ada baik aparat maupun non aparat ditingkatkan melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan. Pembinaan kelembagaan diarahkan agar terjalin kemitraan yang baik antara kelembagaan petani dengan investor ataupun pengusaha. Dengan pengelolaan perkebunan yang baik (*good agriculture practices*) maka akan menghasilkan produk yang baik sehingga akan meningkatkan produksi dan nilai jual yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani itu sendiri. Oleh karena itu sampai akhir tahun 2018 ditargetkan dapat terlatih 1.000 petugas dan petani pekebun yang baru sehingga nantinya dapat memberikan pengetahuannya

dalam melakukan pengelolaan perkebunan yang baik kepada petani lainnya (*training of trainer*).

Selain itu, pengelolaan perkebunan tergantung juga terhadap kemitraan dengan perusahaan. Sampai tahun 2018 ditargetkan sebanyak 220 unit usaha perkebunan yang terawasi baik dari komoditas karet, kelapa sawit dan komoditi lainnya. Untuk komoditas Kelapa Sawit, pola pembinaannya dengan menerapkan Inti dan Plasma sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 26 Tahun 2007. Oleh karena itu diperlukan pengawasan yang intensif untuk menjaga kemitraan yang baik antara petani dan perusahaan agar harga produksi hasil komoditas petani yang dibeli oleh perusahaan mitra tetap baik.

b. Tersedianya Sistem Informasi yang Akurat, Transparan dan Tepat

Data yang akurat, transparan dan tepat dapat meningkatkan proses pembangunan perkebunan menjadi lebih baik. Dengan data yang akurat dapat meningkatkan ketepatan dan perencanaan pembangunan perkebunan yang lebih baik. Informasi yang akurat baik itu mengenai data existing, potensi pengembangan serta transparansi pelaksanaan kegiatan dapat lebih meningkatkan pengelola pemerintah yang baik (*good governance*). Sampai tahun 2018 diharapkan agar tersedia dokumen data statistik, perencanaan

serta laporan dan data perkebunan yang akurat, tepat baik secara manual maupun digitalisasi melalui pemetaan berdasarkan citra data satelit.

c. Meningkatnya mutu dan nilai tambah produk unggulan perkebunan

Meningkatnya mutu dan nilai tambah produk hasil perkebunan diharapkan akan meningkatkan pendapatan petani pekebun. Hal ini dapat tercapai apabila pengembangan agribisnis di berbagai sub sektornya dipadu dan diperkuat seperti di sub system perdagangan hasil/produk perkebunan, sub system pengolahan hasil perkebunan atau agroindustri serta subsistem perdagangan hasil kegiatan agroindustri. Peningkatan mutu dan nilai tambah produk perkebunan akan mengakibatkan peningkatan harga produk-produk perkebunan.

Peningkatan mutu diharapkan akan meningkatkan nilai tambah dari produk sehingga harga jual produk ditingkat petani juga meningkat. terus secara konsisten sebesar 10 % pertahun sehingga harga komoditas perkebunan dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Peningkatan mutu sebesar 10 % pertahun diharapkan akan terus mendorong peningkatan harga ditingkat petani. Tuntutan mutu produk hasil perkebunan akhir – akhir ini baik dalam negeri maupun pasar dunia makin meningkat, namun produk yang dihasilkan perkebunan (terutama perkebunan rakyat) pada umumnya

masih rendah (asalan), sehingga menyebabkan harga jual produk yang diterima petani juga rendah. Untuk mendapatkan mutu produk yang baik, petani sebagai produsen harus menguasai cara pengolahan sesuai SNI dan standarisasi ekspor. Untuk semua hasil produk perkebunan yang akan di ekspor diberlakukan standar ISO 9000, ISO 14.000.

d. Meningkatnya Luas Areal

Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi luas areal perkebunan yang sangat besar. Menurut rencana pola pemanfaatan ruang Provinsi Sumatera Selatan (RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2019), kawasan perkebunan memiliki potensi areal seluas 3,2 juta Ha. Kawasan perkebunan ini tersebar di 14 Kabupaten/kota dengan berbagai topografi wilayah dimasing-masing kabupaten/kota. Sampai saat ini data RTRW masih belum selesai dilakukan revisi dan jumlah Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan telah mencapai 17 Kab/kota setelah adanya pemekaran kabupaten baru. Dari klasifikasi topografi daerah dapat dikeompokkan menjadi dataran rendah (Kabupaten OKI, OI, Banyuasin, Musi Banyuasin), dataran sedang (OKU, OKUT, OKUS, M.Enim, Prabumulih, PALI, Musi rawas, Muratara, Lubuk Linggau dan Palembang) dan dataran tinggi (Pagar Alam, Lahat, Empat Lawang).

Berdasarkan klasifikasi topografi daerah tersebut dapat diklasifikasikan kecocokan pola pengembangan komoditas yang berbasis kawasan. Pengembangan perkebunan di harapkan sampai dengan tahun 2018 akan mencapai 2.561 juta Ha dengan komoditi Karet seluas 1.240.000 Ha, Kelapa Sawit 950.000 Ha, Kopi 249.293 ha, kelapa 65.308 Ha, kakao 10.500 Ha Ha dan komoditi lainnya seluas 45.899 Ha.

Tabel 6. Proyeksi/Perkiraan Luas Areal Perkebunan Tahun 2018.

No	JENIS/KOMODITI	2018
1	Karet (<i>Hevea brasiliensis</i> Mull)	1.240.000
2	Kelapa Sawit (<i>Elaeis guinensis</i> Jacq)	950.000
3	Kelapa (<i>Cocos nucifera</i>)	65.308
4	Kopi (<i>Coffea spp</i>)	249.293
5	Kakao (<i>Theobroma cacao</i>)	10.500
6	Lain-lain	45.899
	Total.....	2.561.000

Luasan areal Kegiatan pembangunan perkebunan rakyat juga difokuskan pada upaya peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan rakyat tua seluas 120.000 ha, sedangkan perkebunan besar diupayakan pada optimalisasi pemanfaatan lahan HGU dan lahan cadangan yang sudah dialokasikan/izin prinsip yang telah diterbitkan.

e. Meningkatnya produksi, produktivitas dan pendapatan petani pekebun

Sejalan dengan meningkatnya luas areal dan upaya lainnya, maka produksi hasil perkebunan akan ditargetkan meningkat sebesar 3,78 juta ton pada tahun 2018. Peningkatan produksi sampai tahun 2018 ini diharapkan didorong oleh produksi komoditas kelapa sawit (CPO) 2,3 juta ton, produksi karet 1.2 ton, produksi kopi 135 ribu ton, produksi kelapa 61.000 ton dan komoditi lainnya 90.000 ton.

Peningkatan produksi ini diharapkan dapat lebih meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan penduduk di Provinsi Sumatera selatan yang sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor perkebunan. Peningkatan produksi ini dilakukan melalui kegiatan intensifikasi, peremajaan, rehabilitasi dan diversifikasi dengan penggunaan teknologi diharapkan produktivitas hasil perkebunan akan meningkat.

5.5. Strategi

Strategis Pembangunan Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan kedepan atau periode 2013-2018 mengacu pada RPJMD 2013-2018 (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) serta Visi dan Misi Gubernur Sumatera Selatan priode 2013-2018 sebagai berikut :

- Pembangunan perkebunan diarahkan pada peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta penciptaan nilai tambah yang menguntungkan.
- Pembangunan perkebunan harus dipercepat melalui peningkatan SDM perkebunan dan pengembangan kelembagaan usaha.
- Mengembangkan agribisnis dan agroindustri perkebunan.
- Pembangunan bidang perkebunan ditingkatkan melalui optimalisasi penggunaan sumberdaya lahan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

5.6. Kebijakan Pembangunan Perkebunan.

Arah kebijakan di bidang perkebunan lima tahun kedepan diambil dari strategi yang ditetapkan adalah :

- meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia perkebunan yang unggul dan memiliki daya saing;

- Membangun kelembagaan keuangan mikro agribisnis pedesaan berbasis penguatan modal usaha kelompok dan kemitraan usaha;
- Meningkatkan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Perlindungan Usaha Perkebunan yang berwawasan lingkungan;
- Mengembangkan jejaring pasar hasil / produk perkebunan lokal, domestik dan internasional;
- Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung diwilayah pengembangan perkebunan;
- Mengembangkan kawasan sentra komoditi perkebunan unggulan daerah;
- Mengembangkan perbenihan dan fasilitasi sertifikasi benih/bibit untuk menjamin kualitas benih/bibit yang beredar dimasyarakat;
- Mengembangkan penggunaan pupuk organik dari limbah organik tanaman perkebunan.

BAB. VI.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

6.1. Program dan kegiatan prioritas.

Arah dan kebijakan dalam pelaksanaan program kegiatan sub sektor perkebunan kedepan lebih dititikberatkan pada Pengembangan Kawasan Agribisnis Perkebunan dan peningkatan kualitas produk hasil untuk mendukung pengembangan industri hilir yang melibatkan peran langsung seluruh stakeholders dalam setiap tahapan kegiatan. Adapun program dan kegiatannya dapat dijabarkan seperti tabel berikut:

Tabel 7. Rencana Program Strategis dalam Pembangunan Perkebunan Propinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2013 – 2018.

NO.	PROGRAM PRIORITAS	K E G I A T A N
1.	Peningkatan Prasarana dan Sarana Perkebunan /P2SP	<ul style="list-style-type: none">➔ Penyediaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Perkebunan.➔ Pengembangan Manajemen Kawasan Utama Produksi Perkebunan.➔ Sertifikasi Lahan Perkebunan➔ Pengembangan pupuk organik➔ Pengembangan dan pengendalian pembiayaan usaha perkebunan.➔ Pembinaan dan Antisipasi kebakaran lahan perkebunan.➔ Pengawasan peredaran Saprodi berlabel.➔ Pengembangan Pemetaan Kawasan Perkebunan➔ Pengawasan Pestisida dan pupuk bersubsidi

2.	Peningkatan Produksi & Produktifitas Perkebunan/P4	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Peremajaan dan pengembangan karet rakyat. ➔ Pengembangan Diversifikasi tanaman kopi rakyat dengan tanaman kakao, lada dan ternak. ➔ Integrasi Tanaman Perkebunan dengan ternak ➔ Pengembangan Tebu rakyat ➔ Pengembangan tanaman berpotensi ekspor. ➔ Pengembangan, peremajaan dan Rehabilitasi Tanaman kopi Rakyat.
3.	Pengembangan Perbenihan Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Pembinaan penangkar Benih Unggul ➔ Pengawasan benih beredar. ➔ Sertifikasi Mutu benih. ➔ Peningkatan SDM Perbenihan. ➔ Peningkatan Prasarana dan Sarana Perbenihan
4.	Pengembangan Tanaman Perkebunan. Proteksi	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Perlindungan Tanaman Perkebunan. ➔ Pengujian Teknologi Proteksi ➔ Operasional Laboratorium Proteksi. ➔ Pengembangan Agensi hayati ➔ Pengendalian Hama penyakit tanaman. ➔ Pengembangan SL-PHT ➔ Pengendalian Penyakit Kering Alur Sadap (KAS) ➔ Pengendalian Penyakit Jamur Akar Putih (JAP) ➔ Pengendalian Hama Penggerek Bubuk Buah Kopi (PBKo) ➔ Pengendalian Hama Babi ➔ Peningkatan Sarana dan Prasarana Proteksi
5.	Pengembangan Pengolahan & Pemasaran Hasil Perkebunan/	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Pengelolaan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

	P2HP	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Pembinaan dan pengawasan Mutu Hasil Perkebunan. ➔ Pengawasan dan Pembinaan UPH Perkebunan. ➔ Promosi dan Pemasaran komoditi perkebunan ➔ Bantuan Alat Pengolahan Kopi ➔ Bantuan Bahan Pembeku Karet ➔ Pembinaan unit pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan ➔ Pasar Lelang terpadu ➔ Bantuan Alat Pengolahan Tebu Rakyat ➔ Pengadaan alat panen karet rakyat ➔ Fasilitasi Forum Bersama Pembangunan Perkebunan ➔ Bantuan alat pengolahan tebu
6.	Pengembangan Kelembagaan Usaha Perkebunan.	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Konservasi dan Pengelolaan Lingkungan Industri Pengolahan ➔ Pembinaan dan Pengawasan Revitalisasi Perkebunan ➔ Pembinaan dan Pengawasan Perkebunan Besar. ➔ Perizinan dan Investasi Perkebunan. ➔ Pengembangan Kemitraan Usaha Perkebunan. ➔ Pembinaan & Pengembangan Kelembagaan petani perkebunan. ➔ Pelatihan dan pengembangan Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE) petani perkebunan
7.	Pengembangan Sentra-Sentra Produksi Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat ➔ Pembuatan Kebun Entres Karet ➔ Pengembangan kebun bibit/sumber benih ➔ Pengembangan Kelapa Rakyat

Tabel 10. Rencana Program Kegiatan SKPD Dinas Perkebunan Sumatera Selatan yang mendukung langsung operasional SKPD Pembangunan Perkebunan Propinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2008 – 2013.

NO.	PROGRAM PRIORITAS	K E G I A T A N
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Penyediaan Jasa Surat menyurat Penyediaan Jasa Kumonikasi Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional Penyediaan Jasa Admnistrasi Keuangan Penyediaan Jasa kebersihan kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Peringatan hari-hari besar Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Jasa Pendukung Admnistrasi Teknis/Adm Keuangan
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Mobelair Rehabilitasi Sedang, Berat Gedung kantor Pengadaan Kendaraan Roda 4 dan 2
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Pengadaan pakaian Olahraga

4.	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	<ul style="list-style-type: none"> ➡ Penyusunan Rencana Kerja SKPD ➡ Penyusunan Rencana Strategis ➡ Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) ➡ Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan kegiatan ➡ Rapat Teknis Program, Monitoring & Evaluasi ➡ Penyusunan Statistik Perkebunan. ➡ Penyusunan Pertanggung jawab kegiatan. ➡ Rapat Teknis, Monev dan Statistik Perkebunan
----	--	--

BAB VII. PENUTUP

Pembangunan bidang perkebunan di Sumatera Selatan memegang peranan penting dalam pembangunan regional dan nasional. Baik sebagai sumber pendapatan masyarakat, penyerap kesempatan kerja, sumber devisa bagi peningkatan perekonomian daerah maupun pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Mengingat pentingnya peranan perkebunan tersebut, maka melalui Rencana Strategis Pembangunan Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2018 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta Kegiatan, kita membangun perkebunan kedepan dengan semangat kerjasama yang kokoh antara pemerintah, swasta dan masyarakat, sehingga harapan kita untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Mudah – mudahan usaha kita akan selalu mendapat Berkah dan Ridho dari **ALLAH SWT. *Amiin Ya robbal Allamiin.***

Tim Penyusun RENSTRA